

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KAMPUNG CURUG SAWER PANDEGLANG

Oleh :

Qirana Nabillang¹⁾, Titi Stiawati²⁾

Qiranabillang29@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1),2)}

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kampung Curug Sawer Pandeglang. Adapun permasalahan dalam penelitian ialah terdapat ketidaktepatan sasaran penerima BPNT, kurangnya komunikasi antar pelaksana BPNT, jadwal pemberian BPNT yang tidak menentu, tidak adanya sosialisasi mengenai BPNT di Kampung Curug Sawer Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Adapun hasil atau temuan yang peneliti dapatkan ialah Program BPNT di Kampung Curug Sawer masih perlu diperbaiki baik dalam menentukan sasaran dari program tersebut, sumber daya waktu, karakteristik dari para agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi. Saran yang peneliti berikan ialah memperbaiki mekanisme yang ada dari program BPNT dan memperbaiki komunikasi antar pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Program BPNT dengan turun kelapangan secara langsung agar sosialisasi dan pendataan dapat sesuai dengan sasaran.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the implementation of the non-cash food assistance program in Curug Sawer Pandeglang village. As for the problem in the study, there were inaccuracies in targeting BPNT recipients, lack of communication between BPNT implementers, uncertain schedules for providing BPNT, no socialization regarding non-cash food assistance in Curug Sawer Pandeglang Village. The research method used by researchers is a qualitative approach. As for the results or findings that the researchers got, the BPNT in Curug Sawer village still needed to be improved both in determining the goals of the program, time resources, the characteristics of implementing agents, and communication between organizations. The suggestions that the researchers that the researchers gave were to improve the existing mechanism of the BPNT program and improve communication between parties involved in implementing the BPNT program by going directly to the field so that socialization and data collection could be on target.

Keyword : Implementation, Non-Cash Food aid

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah rendahnya kemampuan seseorang, sekelompok orang atau wilayah. Menurut Departemen Sosial RI, faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. faktor-faktor internal yaitu dari dalam diri individu tau keluarga fakir miskin yang disebabkan oleh keterbatasan harta yang dimilikinya, juga keterbatasan secara fisik, kapasitas diri dari keintelektualan sampai dengan mental emosional dan spiritual. Kemudian faktor eksternal yaitu yang berada di luar diri individu atau keluarga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, seperti terbatasnya pelayanan sosial dasar.

Kemiskinan dianggap menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh setiap Negara di Dunia. Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah membuat program penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah serius. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang berkerjasama dengan Bank Penyelur.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran seperti memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak pilihan dan

kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran.

Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kampung Curug sawer masih belum merata, dilihat dari data jumlah penerima Program BPNT yang menerima di Kampung curugsawer hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena tidak ada koordinasi antara stake holder di kampung dengan implementor Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial. Hal ini diperkuat oleh Bapak Sekretaris Kampung Curug Sawer yaitu Bapak Umar Zainsyah, bahwasanya dalam penyaluran BPNT ini masih belum merata. Masih ada beberapa warga di Kampung Curug Sawer yang terbilang ekonominya kurang mampu tetapi tidak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kampung Curug Sawer Pandeglang"**. Adapun data yang telah peneliti dapatkan ialah :

No	Nama	RT
1	Jumiati Maseri	1
2	Wati Fatmawati	1
3	Mardiah	2
4	Noneng Sumarni	2
5	Bai Nurhayati	2
6	E. Jumaiah	2
7	Titing Fatimah	2
8	Ucu Afifah	2
9	Yani Maryani	2
10	Juju	2
11	E. Rubaiah	2
12	Eti Jumaeti	2
13	Sopiah	3
14	Mumun Maemunah	4
15	Asih Suwarsih	4
16	Entin Rustini	4
17	Entin	4

18	Winarsih	4
19	Yeyen	4
20	Lili Analiah	4
21	Giatmi	4
22	Rohayati	5
23	Naning	5
24	Elawati	5
25	Ade Suharti	5
26	Ipat Patmawati	5
27	Ita Rosita	6
28	Rosita	6
29	Iyoh	6
30	Jumaeni	6
31	Sri Wahyuni	6
32	Mamay Maesaroh	6
33	Asmariah	7
34	Kartini	7
35	Ulung Hasanudin	7

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Program

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implemenasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Salah satu tolak ukur keberhasilan dari suatu program terletak pada bagaimana proses implementasinya dan tahap implementasi ini merupakan tahap yang paling penting dalam keseluruhan suatu program dalam menilai suatu program dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Carl Horn dengan Model of the Policy Implementation (1975) diantaranya :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 Van Metter dan Van Carl Horn mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
2. Sumber Daya
 Van Metter dan Van Carl Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan tidak kalah penting dengan komunikasi, sumber daya kebijakan harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan kurang atau terbatasnya dana atau instentif lainnya dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
 Karakteristik organisasi pelaksana adalah salah satu faktor yang penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap Para Pelaksana / Disposisi

Menurut Van Metter dan Van Carl Horn, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yaitu tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik termasuk ke dalam faktor eksternal. lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif akan menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian disini ialah pegawai kecamatan kasi kesos dan tim monitoring Program Bantuan Pangan Non Tunai, sekretaris RW, agen pelaksana BPNT, masyarakat yang dapat bantuan pangan non tunai, dan masyarakat yang tidak dapat bantuan pangan non tunai.

Dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ialah menggunakan model dari Miles dan Huberman (2002), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memberikan inovasi terbaru dari penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Eko Yudianto Yunus (2019) yang meneliti tentang "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaraan Kota Probolinggo". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong di Kecamatan Kanigaraan Kota Probolinggo dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan juga menjelaskan bagaimana implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Akan tetapi, masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja. Tujuan program Bantuan Pangan ini belum berjalan

dengan semestinya seperti dalam meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. Selain itu, sikap dari beberapa implementor tidak bertanggung jawab atas tugasnya, sehingga masyarakat mengeluh karena sering terjadi masalah pada mesin edc.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nadira Ilma (2019) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan Bantuan Pangan Nonn Tunai (BPNT) di Kecamatan citaming kota Sukabumi dikatakan belum cukup baik dalam pelaksanaannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian ini memberikan inovasi penelitian di Kabupaten Pandeglang mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai khususnya di Kampung curugsawer pandeglang. Dimana kampung tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam hal ini mencakup hasil penelitian yang ada berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kampung Curug Sawyer Pandeglang. Untuk menentukan hasil penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non tunai di Kampung Curug Sawyer Pandeglang yang optimal, peneliti menggunakan 6 (enam) indicator Implementasi Program menurut Van Matter dan Van Carl Horn. Adapun hasilnya ialah :

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui ukuran

dan tujuan kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit untuk direalisasikan. Van Metter dan Van Carl Horn mengatakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penelitian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Akan tetapi, pencapaian dari ukuran dan tujuan program ini masih belum tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mekanimes untuk menentukan sasaran seperti masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan KPM masih perlu diperbaiki agar tujuan dari program ini dapat dikatakan berhasil.

Sumber Daya

Manusia adalah salah satu sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan dari suatu implementasi program. Keberhasilan implementasi sebuah program atau kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap tahap implementasi program, menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dalam pengimplementasian

Program Bantuan Pangan Non Tunai terdapat kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) pegawai setiap satu kecamatan. Namun, dalam kinerja sumber daya manusianya belum dikatakan baik.

Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai masih belum tepat sasaran dalam pendataan masyarakat yang membutuhkan Bantuan Pangan Non Tunai. Jika dilihat dari sumber daya finansial, masyarakat mendapatkan jumlah yang sama perpagunya ialah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi dalam sumber daya waktu, Bantuan Pangan Non Tunai ini masih belum menentu waktunya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia masih belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam program tersebut. Akan tetapi, dalam sumber daya finansial maupun sumber daya waktu sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dalam program, walaupun masih terdapat kekurangan dalam sumber daya waktu yang seharusnya diturunkan dalam satu bulan sekali.

Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan harus ketat dan disiplin. Selain itu, luas wilayah juga menjadi pertimbangan yang penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dikatakan

Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam karakteristik agen pelaksana telah menjalankan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 dan apabila terdapat agen pelaksana yang melanggar SOP tersebut maka akan mendapatkan sanksi berupa surat peringatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam indicator karakteristik agen pelaksana, SOP yang diberlakukan sudah sesuai dengan kebijakan. Hanya saja fragmentasi atau keluhan masih dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam Kampung Curug Sawer karena tidak ada komunikasi atau Kerjasama terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Sikap Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Van Metter dan Van Carl Horn mengatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dikatakan bahwa para pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai memahami dan menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai serta mendukung keberhasilan dari program tersebut.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti, sikap para pelaksana memang memahami apa tujuan dari kebijakan ini sehingga mereka melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sikap para pelaksana sudah melaksanakan tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena memahami tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Salah satu upaya agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Metter dan Van Carl Horn mengatakan apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementor) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat dikatakan pihak pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah melakukan sosialisasi dengan baik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Akan tetapi, stake holder dari Kampung Curug Sawyer Pandeglang merasa bahwa tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh pihak pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa stake holder atau pihak yang terlibat dalam Program Bantuan Pangan Non

Tunai di Kampung Curug Sawyer Pandeglang tidak mendapatkan sosialisasi. Hal ini pun dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kampung Curug sawer Pandeglang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai masih kurang baik dalam komunikasinya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal juga dapat mendorong keberhasilan dari sebuah kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, salah satu upaya implementasi kebijakan harus mengkondusifkan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat dikatakan bahwa lingkungan ekonomi Kampung Curug Sawyer Pandeglang dikatakan banyak masyarakat yang membutuhkan Bantuan dari program ini. Jika dilihat dari lingkungan sosialnya, Kampung Curug Sawyer Pandeglang dapat dikatakan baik. Akan tetapi, dalam lingkungan politik, terdapat oknum-oknum yang mementingkan kebutuhan pribadinya seperti mempercepat pendataan BPNT dengan tidak turun kelapangan secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan eksternal dari Kampung Curug Sawyer masih belum baik. Hal ini disebabkan karena masih banyak yang lebih membutuhkan bantuan tersebut tapi tidak mendapatkan atau tidak masuk kedalam daftar penerima BPNT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai masih perlu diperbaiki dalam menentukan sasaran dari program tersebut seperti masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. sumber daya manusia masih belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam program tersebut. Akan tetapi, dalam sumber daya finansial maupun sumber daya waktu sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dalam program, walaupun masih terdapat kekurangan dalam sumber daya waktu yang seharusnya diturunkan dalam satu bulan sekali.
3. Karakteristik Agen Pelaksana dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai ini masih perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan para pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun masih terdapat keluhan dari masyarakat dan pihak stake holder Kampung Curug Sawer Pandeglang yang merasa tidak ada komunikasi dan kerja sama terkait program ini.
4. Sikap Kecenderungan (Disposisi) Para pelaksana Program Bantuan Pangan Non

Tunai dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dikarenakan para pelaksana sudah melaksanakan tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena mereka memahami bagaimana Program Bantuan Pangan Non Tunai ini.

5. Komunikasi Antar Organisasi dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kampung Curug Sawer Pandeglang masih perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai.
6. lingkungan eksternal seperti lingkungan Ekonomi, Sosial dan politik dari Kampung Curug Sawer ini dapat dikatakan masih perlu diperbaiki. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan tersebut tapi tidak mendapatkan atau tidak masuk kedalam daftar penerima BPNT.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan masukan untuk Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kampung Curug Sawer Pandeglang sebagai berikut :

1. Memperbaiki mekanisme yang ada karena Program Bantuan Pangan Non Tunai ini di tujukan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) tapi masih ada beberapa masyarakat tidak mendapatkan bantuan tersebut karena mekanisme yang tidak sesuai.

2. Memperbaiki komunikasi antar pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian

Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan turun kelapangan secara langsung agar sosialisasi dan pendataan terkait Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Annafaah, S., & Rahaju, T. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *Publika*, 7(8), 24–39. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31619/28685>
- Azizah, Hamdie, A. N., & As'ad, H. M. U. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*.
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), 61–72. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam : The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77>
- Kharismawati, I.S & Rosdiana, W. (2019). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*
- Ma'ruf, F. S (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mensejahterakan Keluarga Kurang Mampu di Tangerang
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 96–111. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i2.13>
- Sahara, F., Anwar, F., & Darmi, T. (2022). *Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu*

*Kota Bengkulu setiap negara .
Dalam arti yang lebih kecil ,
kemelaratan dianggap sebagai
kondisi (BPNT). di. 4(September),
107–116.*

Wintari, R. (2020). Implementasi
Program Bantuan Pangan Non Tunai
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Di Dusun Dondong,
Jetis, Saptosari, Gunung Kidul. *21(1)*,
1–17.